

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.

Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Amili, Syifaul, dan Pudji Astuti. "Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) yang Disertai Ancaman dan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl)." *Indonesian Journal of Contemporary Law* 1, no. 2 (2023).

Arisanti, Ni Putu Winny, dan I Ketut Rai Setiabudhi. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 5 (2020).

Citron, Danielle Keats, dan Mary Anne Franks. "Criminalizing Revenge Porn." *Wake Forest Law Review* 49 (2021).

Maharani, Nurrachma, dan Abdul Kholiq. "Legal Protection for Victims of Revenge Porn Crimes: A Critical Analysis Based on Victimology Theory." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2024).

Mauliddina, Sintya, Yusti Probowati Rahayu, Ajuni, dan Mary Philia Elisabeth. "Revenge Porn dan Dampak Psikologis pada Korban: Kajian Psikologis dan Tinjauan Singkat Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024).

McGlynn, Clare, Erika Rackley, dan Ruth Houghton. "Beyond 'Revenge Porn': The Continuum of Image-Based Sexual Abuse." *Feminist Legal Studies* 25 (2021).

Mulyadi, Lilik. "Aspek Yuridis dalam Pertimbangan Hakim: Pembuktian Unsur Delik dan Penerapan Hukum Pidana Materiil." *Jurnal Hukum Acara Pidana Indonesia* 4, no. 1 (2023).

Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, dan Lilik Prihatini. "Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non-Consensual." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023).

Widyawati, A., dan K. Dimiyati. "Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual: Studi terhadap 15 Putusan Pengadilan 2020-2023." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 3 (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lsm.

E. Sumber Internet

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyidikan>. Diakses 12 November 2025.

We Are Social, dan Hootsuite. *Digital 2024: Indonesia*. Singapore: We Are Social & Hootsuite, 2024. <https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>. Diakses 22 Juni 2026.